



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/83/V.03/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/03/V.03/HK/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0044/IV.12/2019 tanggal 4 Januari 2019 Perihal Usulan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada Bagian Protokol, Bagian Pemerintahan dan bagian Spriritual dan Kemasyarakatan Setdakab. Lampung Selatan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/03/V.03/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/03/V.03/HK/2019 Tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Diktum Kedelapan Nomor Urut 10, 11 dan 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Nama : NURFEB HARTINI, SE
NIP : 19780207 200701 2 004
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Kasubbag Urusan Haji dan Hari-Hari Besar Keagamaan Bagian Spiritual dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Spiritual dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

11. Nama : A. ADITYA SETIAWAN, S.STP.,MM
NIP : 19921128 201406 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III.b
Jabatan : Kasubbag Perjalanan Dinas Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Protokol Kabupaten Lampung Selatan.

12. Nama : KARTIKA WARDANI, S.H
NIP : 19761119 200701 2 003
Pangkat/Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Kasubbag Transtibum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif pada Bagian Protokol, Bagian Pemerintahan dan Bagian Spriritual dan Kemasyarakatan Setdakab. Lampung Selatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth;

NANANG ERMAJTO

1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala KPPN Bandar Lampung.
4. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.